



**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN
TERORISME**

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL 2024

DISUSUN OLEH

Andhika Chrisnayudhanto



KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Dalam rangka mendukung tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional turut berperan aktif dalam memastikan pencapaian penguatan diplomasi dalam bidang penanggulangan terorisme. Peran Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dilakukan melalui terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Kerja Sama Internasional disusun sebagai pertanggungjawaban dan refleksi dari pencapaian dan komitmen Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Laporan ini merupakan upaya untuk secara transparan menggambarkan pencapaian, tantangan, dan langkah-langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi, dedikasi, dan kerja sama seluruh jajaran Kedeputian Bidang Kerja Sama Internasional. Kiranya Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Hormat kami,

Andhika Chrisnayudhanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
C. Sasaran Strategis BNPT.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
C. Kinerja Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Formasi Jabatan Struktur Organisasi.....	4
Tabel 2 Perjanjian Kinerja.....	16

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional adalah bentuk akuntabilitas dari realisasi capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023. Laporan ini menggambarkan dan memuat analisis capaian kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional membandingkannya dengan target pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional diukur dengan menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi menjadi 3(tiga) perspektif, yaitu: Stakeholder yang mengukur tingkat Satuan kerja, *Internal Business Process* yang mengukur tingkatan operasional Satuan Kerja, dan *Learning and Growth* yang mengukur tingkatan dukungan Satuan Kerja operasional.

Penetapan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional tahun 2023 yang ditetapkan di awal tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang tersebar ke masing-masing perspektif. Sasaran Strategis Deputy Bidang Kerja Sama Internasional adalah SS6 yakni Terselenggaranya sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional dan perlindungan WNI dari ancaman tindak pidana terorisme di luar negeri, yang terperinci dinarasikan pada Bab III yang juga menampilkan seluruh pencapaian IKU Deputy Bidang Kerja Sama Internasional tahun 2024.

Pencapaian target kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Internasional pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 98%, yakni sebanyak 16 Kesepakatan dan 11 Rekomendasi Kebijakan, dengan penyerapan anggaran 99.96%, yakni sebesar Rp 22.882.832.294,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 22.892.811.000,00.



Penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta isu /kegiatan utama (strategic issues) yang dihadapi organisasi sepanjang tahun 2024

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sistematika Laporan Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sesuai mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas untuk menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme serta mengoordinasikan instansi pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Pada pasal 43G huruf d disebutkan bahwa salah satu pelaksanaan mandat tersebut meliputi bidang kerjasama internasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

melalui Deputi Bidang Kerjasama Internasional terus mengembangkan kerja sama pada tingkat regional dan multilateral, kerjasama bilateral dan perangkat hukum internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam upaya bersama sinkronisasi kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Deputi Bidang Kerja sama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Kersin dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi.

LAKIN Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2024 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2024 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di

bidang kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme;
2. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
3. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme, dan;

4. Koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Struktur dan susunan organisasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Berdasarkan Gambar 1 di atas, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dibantu oleh 3 (tiga) direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1) Direktorat Kerja Sama Bilateral;
- 2) Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral; serta
- 3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.

D. Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

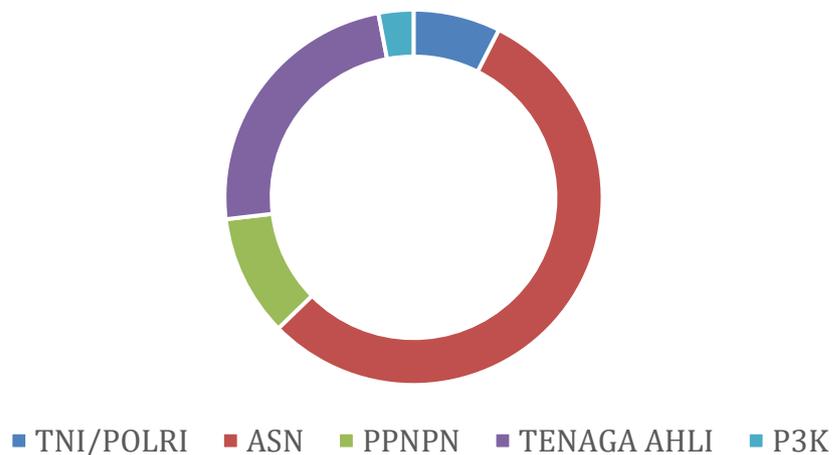
Untuk menjalankan program-programnya, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat

dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik.

Secara kuantitas, jumlah pegawai di Deputi Bidang Kerja Sama Internasional berjumlah pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasarkan status pegawai, jenis kelamin, dan pangkat sebagai berikut:

1. Status Pegawai

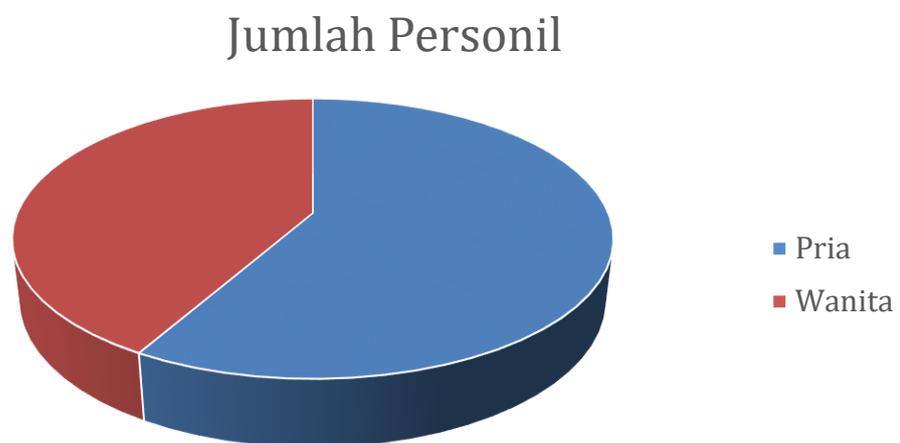
Jumlah Personil



Pegawai di Deputi Bidang Kerja Sama Internasional terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, PPNPN dan Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2024, pegawai di Deputi Bidang Kerja Sama Internasional didominasi oleh PNS dengan jumlah 42 orang atau setara 56%. Setelah itu diikuti oleh TNI/Polri dengan jumlah 5 orang atau setara 7% dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebanyak 7 orang atau setara 10% kemudian pegawai dengan status Tenaga Pendukung Individual dengan jumlah 16 orang atau setara 24% dan pegawai PPPK sebanyak 2 orang atau setara 3%.

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Deputy Bidang Kerja Sama Internasional didominasi oleh pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 45 orang atau sekitar 63% dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 27 orang atau sekitar 38%.



3. Jabatan

Sesuai susunan organisasi di atas, Deputy Bidang Kerja Sama Internasional terdiri dari 20 (dua puluh) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh 1 orang yang dibantu oleh 3 (tiga) eselon II, 5 (lima) eselon III, 1 (satu) pejabat fungsional Ahli Madya dan 11 (sebelas) pejabat fungsional Ahli Muda.

Jumlah jabatan struktural pada Deputy Bidang Kerja Sama Internasional dari 9 jabatan. Posisi formasi tersebut telah terisi sebanyak 9 jabatan, sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah		
		Formasi	Terisi	Belum Terisi
1.	Eselon I	1	1	-
2.	Eselon II	3	3	-
3.	Eselon III	5	5	-
4.	Jabatan Fungsional (Koordinator)	1	1	-
5.	Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)	12	11	1
6.	Staf	51	51	-
Jumlah		73	72	1

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c) Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini dijelaskan terobosan-terobosan yang diinisiasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dan berdampak secara nasional (tidak masuk dalam output yang diukur pada IKU)

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian/keberhasilan.



Ringkasan /Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun 2024

- A. Rencana Strategis Deputy Bidang Kerja Sama Internasional
- B. Rencana Kerja 2024
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Monitoring dan Evaluasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi BNPT

Visi BNPT 2020-2024:

“Negara dan Masyarakat Aman Dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan pernyataan di atas, Visi BNPT 2020-2024 memiliki 3 (tiga) kata kunci, yaitu :

- (1) negara aman dan masyarakat aman,
- (2) dari ancaman terorisme; dan
- (3) dari tindak pidana terorisme

Berdasarkan Visi tersebut, dirumuskan Visi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai berikut:

“Kerja Sama Internasional Yang Efektif dan Efisien Dalam Rangka Mewujudkan Negara dan Masyarakat Aman Dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”

2. Misi BNPT

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 899 Tahun 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan wakil Presiden, BNPT telah menyelaraskan misinya, yaitu:

“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”.

Untuk mendukung misi tersebut Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mengusung misi sebagai berikut:

“Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri”

Misi tersebut berarti Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai salah satu unit kerja BNPT berfokus pada inisiasi dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di dunia. Misi ini sekaligus mempresentasikan bahwa Indonesia menjadi bagian dalam pelaksanaan kerja sama, baik bilateral, regional dan multilateral untuk bersama-sama negara lain memerangi terorisme di dunia. Kerja sama yang dibangun meliputi berbagai hal, mulai dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme hingga penguatan penegakan hukum internasional terkait tindak pidana terorisme.

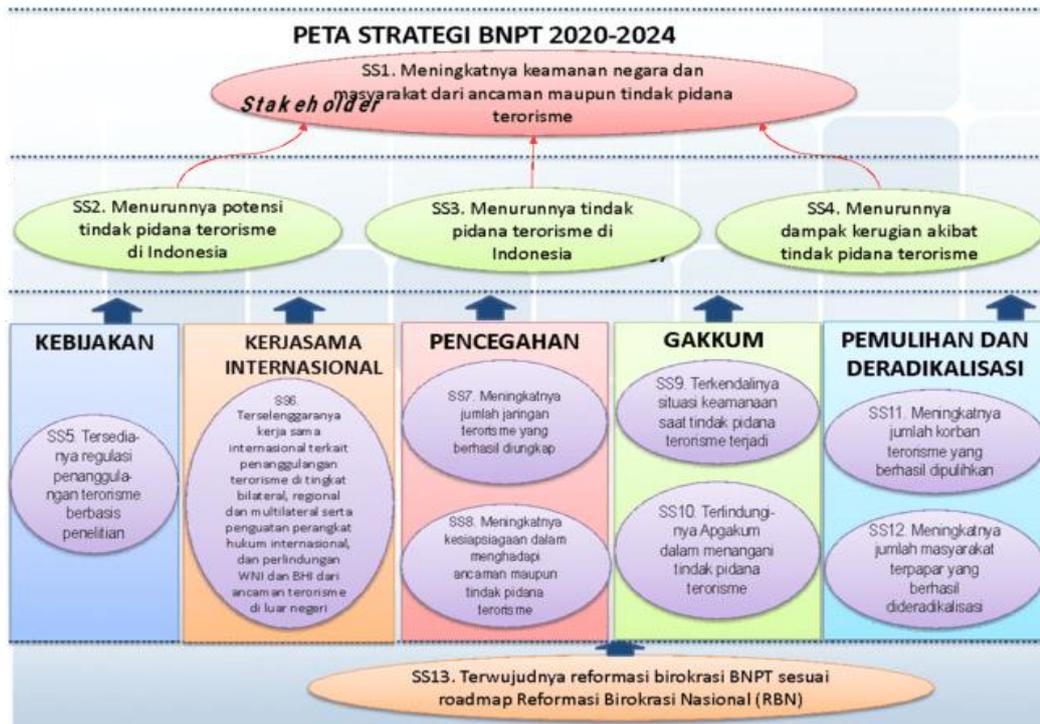
3. Tujuan Strategis

Indikator Tujuan diukur sebagai ukuran dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Tujuan diukur di akhir periode perencanaan (tahun 2024). Berikut merupakan Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Jumlah kerja sama BNPT dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral (MoU)

4. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dalam bentuk capaian secara nyata dan mencerminkan outcome yang dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun sasaran Strategis BNPT telah ditetapkan menggunakan kerangka kerja *balanced scorecard*. Sasaran Strategis ini ditetapkan dalam peta strategi BNPT 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar Peta Strategi BNPT 2020-2024

Gambar di atas menjelaskan strategi BNPT Tahun 2020-2024 melalui 4 (empat) perspektif yaitu *learn and growth*, *internal business process*, *customer*, dan *stakeholder*. Masing-masing perspektif mewakili tinggi atau rendahnya level sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan tercapainya semua sasaran strategis tersebut maka Visi BNPT 2020-2024 diharapkan akan tercapai.

Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis BNPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu "Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri".

Sasaran program tersebut berarti seluruh kegiatan dan program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional akan diarahkan untuk mewujudkan kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Selain itu, penguatan perangkat hukum

internasional serta perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri juga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan dan program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

5. Program dan Kegiatan

No.	Output	Penetapan Kinerja
1.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	1 Kesepakatan
2.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	3 Kesepakatan
3.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	1 Kesepakatan
4.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	3 Kesepakatan
5.	Menyepakati Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan
6.	Pelaksanaan Kerja Sama Regional	2 Kesepakatan
7.	Menyepakati Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan
8.	Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral	2 Kesepakatan
9.	Tingkat Partisipasi aktif BNPT pada pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional	4 Rekomendasi Kebijakan
10.	Tingkat Partisipasi aktif BNPT dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme	7 Rekomendasi Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Terkait dengan perjanjian kinerja. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, diwajibkan kepada seluruh entitas

Tabel 1 Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Terselenggaranya kerja sama Internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	1. Persentase implementasi kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase kerja sama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional	Rp. 22.892.811.000,00

C. Sasaran Strategis

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 halaman 88, salah satu arah kebijakan dan strategi BNPT yaitu optimasi kerja sama Internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kerjasama penguatan perangkat hukum Internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme.



3

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama
- C. Kinerja Anggaran



**QUALITY
WORK**

ACCOUNTABILITY

DISCIPLINE

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pada tahun 2024 capaian fisik Kedeputusan Bidang Kerja Sama Internasional sebesar 16 Kesepakatan dan 11 rekomendasi kebijakan dengan capaian kinerja selama tahun 2024 sebesar 98%. Adapun capaian masing-masing komponen program kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

No	Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
2.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan
3.	Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan

	dengan negara-negara di Amerika dan Eropa		
4.	Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan
5.	Menyepakati Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
6.	Pelaksanaan Kerja Sama Regional	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan
7.	Menyepakati Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
8.	Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan
9.	Tingkat Partisipasi aktif BNPT pada pelaksanaan konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
10.	Tingkat Partisipasi aktif BNPT dalam upaya perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan

2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	1. Persentase implementasi kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti	8 (delapan) kesepakatan	7 (tujuh) kesepakatan	94
		2. Persentase kerja sama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	9 (sembilan) kesepakatan	9 (sembilan) kesepakatan	100
		3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	11 (sebelas) rekomendasi kebijakan	11 (sebelas) rekomendasi kebijakan	100

i. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Renstra

Sasaran Strategis “Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri”			
Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024	
Target	Realisasi	Target	% terhadap target Renstra
100%	98%	100%	100%

ii. Perbandingan realisasi kinerja 2023 dan 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023			Indikator	2024		
		Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	100%	100%	100%	1. Persentase implementasi kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti	100%	94%	94%
					2. Persentase kerja sama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
					3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Direktorat Kerja Sama Bilateral

Direktorat Kerja Sama Bilateral telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang terukur sebagai pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

a. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika

- 1) Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara mitra dalam penanggulangan terorisme dilaksanakan di bawah payung hukum MoU. Selama tahun 2024, Indonesia melalui BNPT telah melaksanakan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme melalui perumusan dan

penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme dengan negara mitra dengan target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan, yaitu **Penandatanganan Memorandum Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Jepang.**

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 21-24 Februari 2024, Delegasi BNPT yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional telah melaksanakan kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan ini utamanya dimaksudkan untuk melakukan Penandatanganan Memorandum Kerja Sama (MOC) Penanggulangan Terorisme antara BNPT dan Badan Kepolisian Nasional (NPA) Jepang.

Pada tanggal 22 Februari 202, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT dan Direktur Jenderal Departemen Urusan Luar Negeri dan Intelijen NPA telah melakukan Penandatanganan MOC terkait penanggulangan terorisme antara BNPT dan NPA Jepang di Tokyo.

Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti implementasi MOC untuk memperkuat kerja sama khususnya pertukaran Informasi, termasuk dalam hal penanganan warga negara Indonesia yang terasosiasi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)

Faktor Keberhasilan : Terjalannya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) Kesepakatan.

b. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika

Pelaksanaan kerjasama Bilateral dengan negara-negara di asia pasifik dan afrika ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) kesepakatan, yang terdiri dari:

- 2) Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dengan Negara mitra di Asia Pasifik dan Afrika mengalami beberapa kali penundaan dikarenakan perkembangan situasi keamanan dan konflik Kawasan. Direktorat Kerja Sama Bilateral melakukan penyesuaian dan alternatif dengan mendorong negara-negara di Kawasan non konflik yang pro aktif dalam kerja sama penanggulangan terorisme diantaranya **pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Kanada.**

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 13 November 2024, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) telah melakukan kunjungan kerja ke Ottawa, Kanada, dalam rangka menghadiri rangkaian Pertemuan Bilateral Counter Terrorism Consultation ke-2 antara Indonesia dan Kanada.

Pada pertemuan konsultasi tersebut, dibahas sejumlah isu diantaranya: penilaian ancaman terorisme pada tingkat global, regional dan nasional; upaya dalam penanggulangan terorisme; perkembangan terorisme internasional dan tantangan pendanaan terorisme, Gender dan P/CVE, Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan program peningkatan kapasitas.

Pertemuan Konsultasi Bilateral ini merupakan momentum kedua negara untuk saling berdiskusi dan berbagi Informasi terkini terkait penanggulangan Terorisme kedua negara serta melanjutkan komitmen untuk melaksanakan kerja sama teknis antara Indonesia dan Kanada, khususnya pada isu radikalisisasi online yang menargetkan pemuda.

Faktor Keberhasilan : Meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 3) Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2024 ini dilaksanakan 1 kali pertemuan fisik di Solo yaitu Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Januari-Juni. Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Juli-Desember dan Rapat penyusunan buku tahunan tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pemotongan dan penyesuaian anggaran.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 28 Juni 2024, telah dilaksanakan Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Januari-Juni 2024 di Solo, Jawa Tengah.

Rapat dihadiri oleh Perwakilan K/L terkait diantaranya Kemerkopolhukam, Kemlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenag, BAIS TNI, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan Agung, BIN, LPSK, Satgas FTF BNPT, dan perwakilan unit-unit kerja BNPT, serta tim Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Rapat bertujuan untuk mengetahui perkembangan aksi terorisme dari berbagai wilayah dunia yang meliputi sebaran serangan terorisme, korban dan pelaku pada periode Januari-Juni 2024. Adapun narasumber yang diundang berasal dari perwakilan BIN, BSSN, PPATK, Densus 88 AT Polri dan Satgas FTF BNPT.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap potensi penyebaran propaganda dan ancaman kelompok terorisme yang memanfaatkan perhelatan nasional tahun ini seperti HUT RI, kunjungan tokoh dunia, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta Pilkada serentak.

Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Juli-Desember dan rapat penyusunan buku tahunan tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pemotongan dan penyesuaian anggaran.

Namun demikian, hasil analisa perkembangan terorisme internasional tahun 2024 telah tersusun yang berisi analisis serangan terorisme secara global pada tahun 2024 serta peristiwa penting yang terjadi di berbagai

kawasan.

Faktor Ketidakberhasilan : Tidak dapat terlaksananya 2 tahapan kegiatan karena pemotongan dan penyesuaian anggaran.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut adalah tidak memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya 2 tahapan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pemotongan dan penyesuaian anggaran.

- 4) Koordinasi dan kerjasama dengan negara mitra dan lembaga lainnya pada Tahun 2024, dilakukan dengan melakukan pertemuan dan koordinasi terkait isu terorisme dan penanggulangannya. BNPT melaksanakan Kunjungan Kerja ke Australia.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 1-5 Juni 2024, Kepala BNPT RI dan Delegasi telah melaksanakan kunjungan kerja ke Australia. Pelaksanaan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti berbagai program kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia.

Dalam rangkaian kunjungan, Kepala BNPT melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Australia Hon. Tim Watts MP dan pertemuan dengan Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia H.E. Richard Feakes. Delegasi BNPT yang hadir juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke National Threat Assessment Center (NTAC), Australian Federal Police (AFP) Museum., dan AFP Forensic Facilities

Dalam pertemuan dengan NTAC, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama penyusunan national threat assessment yang akan dikelola oleh Pusdalsis BNPT melalui pelaksanaan FGD dan lokakarya untuk mengembangkan kemampuan analitis dan berpikir kritis para analis BNPT.

Faktor Keberhasilan : Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

c. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa

- 5) Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan yaitu koordinasi, monitoring, dan evaluasi perumusan dan penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Rumania.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 7 Juni 2024 telah dilaksanakan penandatanganan *Arrangement on Counter Terrorism Cooperation* antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dengan Romanian Intelligence Service (SRI) Rumania;

Penandatanganan *Arrangement* ini merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Rumania.

Pihak penandatanganan dari Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI, Bapak Andhika Chrisnayudhanto dan pihak penandatanganan dari Rumania diwakili oleh Duta Besar Rumania untuk Indonesia, H.E. Dan Adrian Bălănescu.

Penandatanganan *Arrangement* ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Umar Hadi,

serta secara virtual oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania, Y.M. Meidyatama Suryodiningrat yang berada di Bucharest.

Faktor Keberhasilan : Menguatnya hubungan Bilateral yang telah terjalin melalui evaluasi Kerjasama bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

d. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa

Pelaksanaan Kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa memiliki target capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) kesepakatan yaitu,

- 6) Pelaksanaan *Joint Working group (JWG)* dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan JWG dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Slowakia.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 6 Desember 2024, Direktorat Kerja Sama Bilateral telah melaksanakan Pertemuan ke-2 Joint Working Group on Countering Terrorism antara Indonesia dan Slowakia di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT dan turut dihadiri oleh Internal BNPT serta perwakilan Kementerian dan Lembaga meliputi perwakilan dari Kemenko Polkam, Kemenlu, BIN, dan Densus 88.

Delegasi Slowakia dipimpin oleh Major Gabriel Thur - Deputy Director and Head of the Analytical Department of the Anti-Terrorism Center of The Police Force dan didampingi oleh Major Martin Baran - Senior Specialist Referent of The National Contact Point for Terrorism of The Anti-Terrorism Center of The Police Force; dan Daniel Dom - Deputy Chief of Mission,

Slovak Embassy.

Pertemuan ini akan fokus pada evaluasi implementasi kerja sama yang telah berjalan serta rencana pengembangan lebih lanjut, termasuk program deradikalisasi dan penanganan *militant accelerationism*.

BNPT akan memperkuat kerja sama dengan Slovakia dalam kerangka ASEAN dan ECOSOC, khususnya dalam pelaksanaan Resolusi ECOSOC terkait anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teror. Indonesia juga akan mendorong Slovakia untuk berkontribusi dalam mendukung inisiatif ASEAN PoA PCRVE 2025-2030.

BNPT dan pemerintah Slowakia akan mengadakan sesi pertukaran informasi mengenai mekanisme penanganan kasus radikalisi dan ekstremisme serta repatriasi. Pertukaran Informasi dan menjajaki kemungkinan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas personel di bidang kontra-terorisme. Pelatihan ini dapat mencakup analisis ancaman, penanganan konten ekstremis di ruang siber, dan pendekatan strategis dalam program deradikalisasime.

Faktor Keberhasilan : Meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah dilaksanakan dengan pelaksanaan pertemuan Tingkat tinggi antara BNPT dan the Internal Security Agency (ABW) Polandia

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 8 – 11 Agustus 2024, BNPT RI telah melakukan kunjungan kerja ke Warsawa, Republik Polandia. Delegasi BNPT dipimpin oleh Kepala BNPT dan didampingi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Direktur Perangkat Hukum Internasional, Direktur Kerja Sama Bilateral,

Subkoordinator Pelindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri dan 1 Personil Direktorat Kerjasama Bilateral.

Kunjungan Kerja dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka pelindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di Kota Warsawa, Polandia, serta pertemuan dengan Cabinet of The Head of The Internal Security Agency (ABW) Polandia.

Adapun rangkaian kegiatan Delegasi antara lain kunjungan ke The Internal Security Agency (ABW) Polandia, pada 9 Agustus 2024, dan Diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka pelindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di Kota Warsawa, 9 Agustus 2024.

Sebagai tindak lanjut, BNPT akan mengirimkan data terkait tiga WNA asal Uzbekistan yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia pada awal tahun 2024 atas rencana serangan terorisme di Amerika Serikat.

BNPT akan menindaklanjuti permintaan ABW terkait informasi mengenai penangkapan WNA Polandia, Jakub Skrzypski, yang terlibat dalam aksi pemberontakan di Papua pada tahun 2017. Informasi yang diperlukan akan segera disampaikan kepada pihak ABW.

BNPT melalui Direktorat Kerja Sama Bilateral akan segera mengirimkan proposal dan draft terbaru dari Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanggulangan terorisme antara BNPT dan ABW Polandia, sebagai tindak lanjut dari diskusi yang telah dilakukan pada pertemuan di Warsawa.

Faktor Keberhasilan : Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intelijen dengan negara mitra tahun 2024 telah dilaksanakan penggalangan dengan beberapa negara antara lain Singapura, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Selandia baru, Australia, Rusia, Slovakia, Rumania, Arab Saudi, Belgia, dan India.

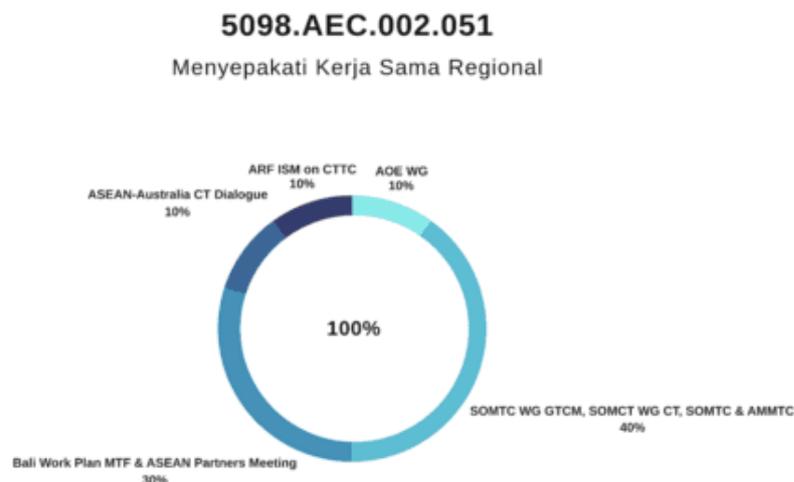
Faktor Keberhasilan : Tersedianya Informasi terkait dengan perkembangan terorisme dari negara lain.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Berikut adalah rincian pelaksanaan program kegiatan Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral dengan capaian kinerja 9 (sembilan) kesepakatan serta Sekretariat Bersama RAN PE dengan capaian kinerja 3 (tiga) kegiatan selama tahun 2024:

5098.AEC.002.051. Pada output “Menyepakati Kerja Sama Regional” telah mencapai target kinerja hingga 100% (1 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:



Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme ASEAN dan Organisasi Regional lainnya.

- a) Melalui mekanisme SOMTC/AMMTC, Indonesia berperan sebagai *voluntary lead shepherd* pada isu penanggulangan terorisme di ASEAN dan berkomitmen untuk mengimplementasikan *Bali PCRVE Work Plan 2019-2025* sebagai kerangka kerja tindaklanjut dari *ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018 – 2025)*. Dalam rangka memonitoring dan melakukan evaluasi implementasi Bali Work Plan, Pemri telah menyelenggarakan pertemuan "*The 4th Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force (MTF) Meeting*", serta "*The 4th ASEAN Partners Meeting*" pada 26 September 2024, dimana melalui pertemuan tersebut dicatat sebanyak 63 (53,85 %) dari total 117 aktivitas indikatif yang terencana telah dilaksanakan oleh *ASEAN Sectoral Bodies/Organs/Entities* terkait selama periode 2019-2024.

- b) BNPT sebagai *Chair* pada *SOMTC Working Group on CT* aktif mendukung pertemuan-pertemuan antara lain: *2nd ASEAN SOMTC Working Group on General Crime* di Laos pada 20-22 Maret 2024; *20th SOMTC Working Group on Counter Terrorism* pada 5 Juni 2024; *24th ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings* pada 20-30 Juni 2024; dan *18th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings (AMMTC)* pada 26-31 Agustus 2024.

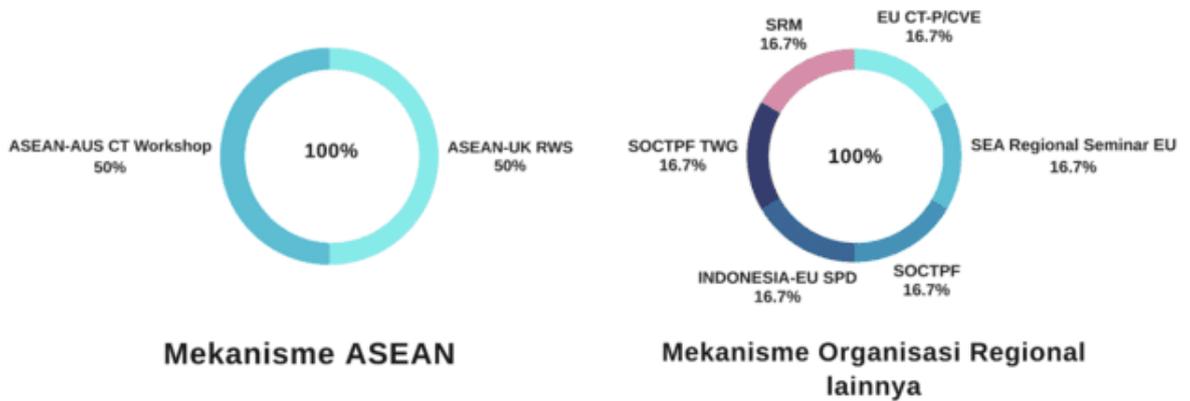
- c) BNPT juga aktif mendukung pertemuan bersama mitra dialog ASEAN, seperti *3rd ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue* pada 6 Juni 2024. Strategi yang diupayakan untuk mengimplementasikan prioritas ini, yaitu BNPT dalam *framework* kerjasama SOMTC telah berhasil menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Australia, dalam mendorong pengesahan 2 (dua) *Concept Note* baru, untuk mendorong implementasi dari *Bali Work Plan*, yaitu:

- 1) *ASEAN-Australia Workshop Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches for Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and their Families*, serta
 - 2) *ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism*.
- d) Partisipasi pada *The 8th ASEAN Our Eyes Working Group Meeting* di Singapura, 12–15 Maret 2024, membahas perkembangan terorisme di ASEAN dan kerja sama *Strategic Information Exchange (SIE)*. Forum menyepakati pembaruan kontak *AOE Point of Contacts* ke Singapura serta pelaksanaan pertemuan ke-9 pada 2025 di Malaysia. Inisiatif Kemhan RI ini menjadi wadah berbagi informasi antar-Kementerian Pertahanan ASEAN, dengan harapan tidak terjadi tumpang tindih dengan *SOMTC WG on Counter Terrorism*.
- e) Partisipasi pada *The 20th ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crimes (ARF ISM on CTTC)* di Honolulu, Hawaii, 1–5 Mei 2024, membahas ancaman terorisme, *Border Security Management*, dan *ARF Work Plan CTTC 2024–2026*. Dua inisiatif diajukan, yaitu *workshop* keamanan perbatasan (Filipina) dan strategi rehabilitasi P/CVE (AS). AS meminta Indonesia menjadi *co-host workshop* P/CVE, yang masih dikaji oleh Kemlu RI dan BNPT.

5098.AEC.002.052. Pada output “Pelaksanaan Kerja Sama Regional” telah mencapai target kinerja hingga 100% (2 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:

5098.AEC.002.052.

Pelaksanaan Kerja Sama Regional



1) Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme ASEAN.

Melalui mekanisme AMMTC/SOMTC, BNPT juga aktif bekerja sama dengan beberapa Negara Mitra Dialog dalam pelaksanaan beberapa proyek pengembangan kapasitas. Di antaranya:

- a. *ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches to Countering Violent Extremism, Hate Speech and Disinformation Online* di Bali pada 29 Januari-1 Februari 2024. Kegiatan ini memfasilitasi negara-negara di ASEAN untuk bertukar pandangan, pengalaman, dan rekomendasi dalam menghadapi konten ekstremisme berbasis kekerasan, ujaran kebencian, disinformasi *online* sebagai bagian dari penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan internet untuk agenda ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisasi *online*.
- b. *ASEAN-UK Regional Workshop Series on Counter-Terrorism and Violent Extremism (CTVE)* di Bali, 27 September 2024. *Workshop* dilaksanakan secara paralel dengan dua tema utama, yaitu: 1) *Gender mainstreaming within counter terrorism (CT) and preventing violent extremism (PVE) policy and operations*; serta 2) *Strategic Communications, guna mendukung*

implementasi dari ASEAN-UK Plan of Action to Implement the ASEAN-UK Dialogue Partnership, sejalan dengan implementasi Bali Work Plan 2019-2025.

2) Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme Organisasi Regional lainnya.

Selain itu BNPT juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan antara lain:

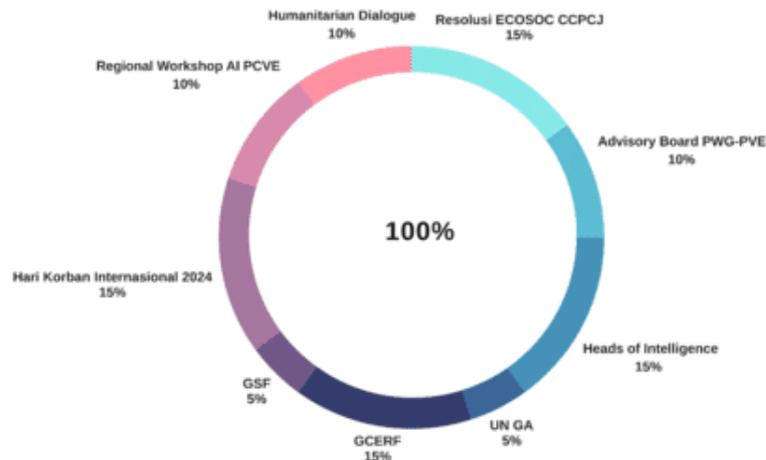
- a. *Seminar The EU Counterterrorism and Preventing and Countering Violent Extremism Ecosystem and Priorities of Practice* di Belgia, 21-27 Januari 2024. Seminar ini bertujuan untuk memahami ancaman yang dihadapi oleh EU, jaringan, serta pendekatan yang dilakukan oleh EU. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan membangun jaringan antara praktisi CT-P/CVE di Eropa dan Indo-Pasifik.
- b. *Southeast Asia Regional Seminar on EU Engagement in Counter Terrorism and P/CVE: Progress and Evolving Priorities for 2025-2028* di Bogor, 24-25 April 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan merumuskan prioritas kerja sama antara Uni Eropa dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan periode 2025–2028. BNPT mengapresiasi program kerja sama Uni Eropa yang telah fokus pada pencegahan pendanaan terorisme, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta deradikalisasi.
- c. Partisipasi pada *Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum (Policy Forum) Technical Working Group* di Australia, 30 Juni–4 Juli 2024, fokus pada pengembangan protokol notifikasi online untuk pertukaran informasi insiden terorisme. Delegasi Indonesia memberikan masukan, mendaftarkan Polhukam dan BNPT sebagai kontak sementara, dan hasilnya akan dilaporkan pada pertemuan *Senior Regional Meeting on CT* di Bali, Juli 2024.

- d. *The 5th Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM)* di Bali, 28 Juli – 1 Agustus 2024, membahas isu-isu penting seperti ancaman ISIL, radikalisme melalui teknologi, perlindungan anak dari terorisme, dan rehabilitasi ekstremis. Diskusi juga mencakup pembaruan hasil SOCTPF sebelumnya dan rencana pelaksanaan SOCTPF 2024 yang dipimpin Singapura dan Thailand. Pertemuan menghasilkan *draft Joint Statement* untuk masukan lebih lanjut.
- e. *The 8th Indonesia-EU Security Policy Dialogue* di Semarang, 17–19 September 2024, membahas isu keamanan global seperti penanggulangan terorisme, keamanan maritim, dan kejahatan transnasional. Dialog ini menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama keamanan Indonesia-Uni Eropa.
- f. *The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF)* di Singapura, 19–20 November 2024, membahas penggunaan AI dan teknologi dalam penanggulangan ekstremisme online serta pengembangan *Concordance of Extremist Content Online* dan disepakati untuk memperbarui strategi P/CVE untuk menghadapi ancaman terorisme di dunia maya.

5098.AEC.002.053. Pada output “Menyepakati Kerja Sama Multilateral” telah mencapai target kinerja hingga 100% (1 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:

5098.AEC.002.053

Menyepakati Kerja Sama Multilateral



Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Multilateral lainnya.

Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari dunia internasional, antara lain:

a) BNPT berhasil menginisiasi diadopsinya Resolusi ECOSOC E/RES/2024/12 tentang *“Treatment of Children Associated with Terrorist Groups, including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups”* pada pertemuan ke-33 *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* yang diadakan di Wina, Austria, pada 17 Mei 2024.

- Resolusi ini berhasil diadopsi secara konsensus pada 17 Mei 2024, dengan sponsor dari 43 negara termasuk Indonesia. Resolusi menyoroti pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak, dalam memerangi terorisme; mengutuk perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh kelompok teroris; mengakui status hukum anak-anak yang terkait

dengan kelompok teroris utamanya sebagai korban dan perlu mendapatkan perlakuan sebagai korban. Lebih lanjut Resolusi memandatkan ECOSOC untuk meminta Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengadakan pertemuan kelompok ahli antar pemerintah (*Intergovernmental Expert Group Meeting/IEGM*) yang bertujuan mengembangkan prinsip dan pedoman (***principles and guidelines***) yang dapat digunakan oleh negara anggota dalam memperlakukan anak-anak yang terkait dengan kelompok teroris.

- Keberhasilan ini menggarisbawahi kepemimpinan Indonesia pada upaya penanggulangan terorisme, sekaligus meningkatkan postur keanggotaan Indonesia pada CCPCJ (2024-2026), implementasi komitmen keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB (2024-2026) yang salah satu prioritasnya adalah memajukan hak anak dan perempuan, serta rencana Indonesia untuk mengajukan diri sebagai anggota Komite Konvensi Hak Anak dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
- b) Pada 2024 BNPT telah memulai komitmen kerja sama dengan *Global Community Engagement Fund (GCERF)* yang berfokus pada pendekatan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme berbasis kekerasan melalui pelibatan aktor di daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta dalam rangka memperluas cakupan inisiatif P/CVE. Komitmen kerja sama ini akan dilaksanakan di 2025 setelah di 2024 ini dilaksanakan penentuan mitra Organisasi Masyarakat Sipil di tingkat nasional dan daerah serta lokus intervensi program di 3 daerah (Sulteng, NTB, dan Jakarta).
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pertemuan *Regional ke-9 Heads of Intelligence and Security Services Concerning ISIL (Da'esh) dan Al-Qaida* di Bali, 28 Februari–1 Maret 2024, BNPT (Dit RM) dan Kemlu (Dit KIPS) menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri delegasi dari 8 negara. Pertemuan ini bertujuan tukar informasi mengenai ancaman *ISIL (Daesh)* dan *Al-Qaida*

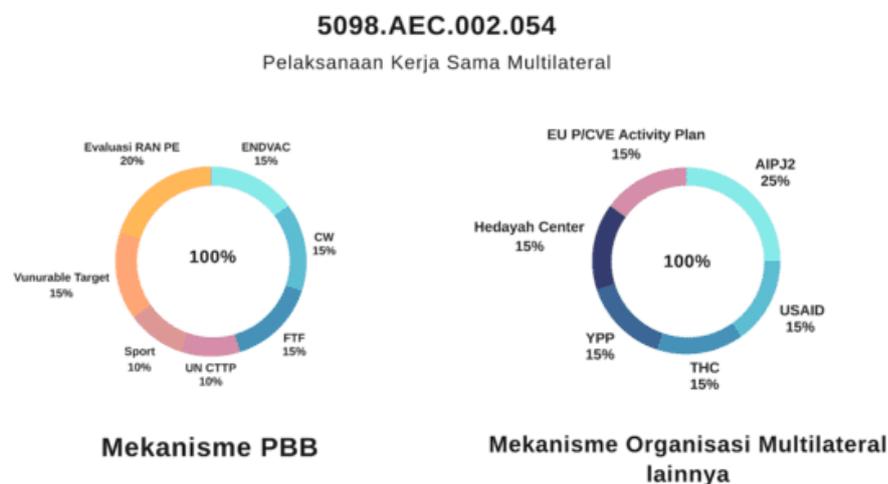
serta mendorong kerja sama dengan PBB dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan penerapan resolusi DK PBB 1267.

- d) *Regional Workshop on the Ethical Use of AI and Advanced Technologies to Prevent and Counter Terrorist Exploitation of Online Spaces* di Singapura, 15–19 April 2024, diselenggarakan oleh UNODC, Singapura dan Jepang. Workshop menghadirkan ahli AI yang membahas tantangan pencegahan terorisme online. Indonesia perlu menyusun regulasi, bekerja sama dengan penyedia media sosial seperti META dan Twitter, serta mencari ahli AI untuk mengembangkan teknologi PCVE yang efektif.
- e) *Advisory Board Roundtable and Second Regional Meeting of The Thematic Working Group on Strategic Communications, the Internet and Social Media within the Framework of the Preparatory Working Group of PVE Practitioners of South-Asia (PWG-PVE)* di Malaysia, 13 – 17 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh UNODC, SEARCCT, dan Pemerintah Jepang. Pertemuan membahas situasi di *Advisory Board PWG PVE*, berbagi pengalaman, praktik baik, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pakar komunikasi untuk memperkuat ketahanan dari ancaman ideologi kekerasan.
- f) *The 2024 Global Security Forum (GSF)* di Doha, Qatar 19 – 23 Mei 2024, dihadiri oleh Deputi Kerja Sama Internasional BNPT sebagai narasumber. Tim BNPT juga bertemu dengan Kemlu Qatar untuk membahas tindak lanjut perlindungan anak dari kelompok terorisme, serta dengan delegasi Azerbaijan untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme. BNPT berdiskusi dengan *think tanks* seperti IJ dan The Soufan Center untuk memperluas kolaborasi PVE, dan bertemu dengan BTIG untuk membahas potensi investasi di Indonesia.
- g) Hari Internasional untuk Peringatan Korban Terorisme 2024 di Bogor, 21 Agustus 2024, diselenggarakan sesuai dengan Resolusi 72/165 Majelis Umum PBB. Acara ini merupakan kolaborasi antara BNPT, LPSK, dan UNODC yang bertujuan untuk menghormati serta memberikan dukungan

kepada korban terorisme, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi dan mendukung para korban tindak pidana terorisme.

- h) Side Event Sidang Umum PBB ke-79 bertema “*Advancing Global Rehabilitation and Reintegration Efforts*” yang diselenggarakan oleh Hedayah di New York, 22–26 September 2024, membahas pengalaman dan praktik baik rehabilitasi serta reintegrasi (R&R). BNPT turut berpartisipasi dengan Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral menjadi narasumber, menekankan pendekatan multistakeholder dalam R&R di Indonesia.
- i) Pertemuan “*Repatriating Detainees and Displaced Persons in Northeastern Syria: Challenges and Best Practices*” di Jenewa, 9–10 Oktober 2024, diselenggarakan oleh *Centre for Humanitarian Dialogue* untuk berbagi saran dan memperkuat jejaring antar negara yang melakukan repatriasi warga negara. BNPT dan Satgas WNI di luar negeri diharapkan menindaklanjuti hasil pertemuan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

5098.AEC.002.054. Pada output “Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral” telah mencapai target kinerja hingga 100% (5 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:



1) Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kesepakatan dilaksanakan melalui kerjasama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:

- a) Kerja sama dengan UNODC melalui program "*Protecting Children from Terrorism: Indonesia's role and the partnership with UNODC*" telah menghasilkan sejumlah capaian, antara lain:
- Desentralisasi pelatihan asesmen psikososial anak bagi pekerja sosial dan psikolog dalam mempromosikan dan mendorong rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif.
 - Memperkuat pelatihan sektor keamanan dan peradilan dalam penanganan situasi anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris melalui ToT terhadap aparat Densus 88
 - Meluncurkan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme bekerjasama dengan Kementerian PPPA.
 - Memperkuat pemahaman pemangku kepentingan nasional dalam penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris, melalui penyelenggaraan Dialog Tingkat Tinggi dan diseminasi Laporan Penelitian hasil kerja sama BNPT dengan UNODC "*Targeted by Terrorist: Child Recruitment, Exploitation, and Reintegration in Indonesia, Iraq and Nigeria*".
 - Membagikan *lesson learned* dan praktik baik Indonesia dalam isu penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris di kawasan maupun global melalui penyelenggaraan *Cross Regional Event "Child Resilience in Insecurity Contexts: Preventing and responding to child association with terrorist groups"* dengan melibatkan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.
- b) UNODC-UNICRI-OPCW melalui *Project "Building a safer South-East Asia by preventing and responding to the use of chemical weapons by terrorists and other non-state actors in Indonesia"* menghasilkan serangkaian kegiatan

pelatihan bagi aparat penegak hukum, *first responders*, pemangku kepentingan di daerah, pemerintah dan sektor industri dalam mencegah, deteksi dan merespon resiko serta ancaman terorisme kimia, serta menginisiasi penyusunan *Policy Paper to prevent and respond to chemical terrorism in Indonesia* dengan melibatkan K/L terkait, yang akan diintegrasikan dengan Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme yang saat ini juga dalam proses penyusunan BNPT.

- c) UNODC dan Australia dalam project “*Enhancing knowledge, operational capacities, and cross-border information sharing to counter threats posed by foreign terrorist fighters in Indonesia, Malaysia and the Philippines*” (project *FTF*), telah menyelenggarakan kegiatan “*Roundtable Technical Meeting on Policy, Regulatory and Cross-Border Information-Sharing Aspects of Handling Foreign Terrorist Fighters and their Accompanying Family Members in Indonesia*”, pada 26-27 Maret 2024, di Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi K/L terkait dalam bertukar pandangan serta membahas tantangan menghadapi ancaman oleh FTF dan keluarganya di Indonesia.
- d) UNOCT melalui *Global Programme on Countering Terrorist Threats against Vulnerable Target*, pada 2024 memulai membahas kerja sama dalam rangka penyusunan Kurikulum Pelatihan terkait Pelindungan Infrastruktur yang Rentan terhadap Serangan Aksi Terorisme di Indonesia. Ini merujuk pada keberhasilan kerja sama sebelumnya di 2023 yang menghasilkan *Roadmap to Strengthen the Protection of Vulnerable Targets against Terrorist Threats*, melaksanakan *workshop rising awareness* K/L dan pelatihan *first responder* K/L dan sektor industri melalui *table top exercise on Countering CBRN Terrorist Threats against Vulnerable Targets*.
- e) BNPT bekerja sama dengan UNOCT dan Kemenpora menyelenggarakan *Harnessing the Power of Sports and its Values to Strengthen Social Cohesion and Impact on Community Resilience* di Bali, 1 – 3 Oktober 2024, untuk berbagi praktik baik dalam meningkatkan keamanan venue olahraga dan peran olahraga dalam memperkuat kohesi sosial serta resiliensi terhadap ekstremisme kekerasan.

- f) Bekerjasama dengan UN WOMEN dalam melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Evaluator Independen. Kerjasama ini juga mencakup penyelenggaraan FGD untuk mengidentifikasi capaian RAN PE dimaksud.
- g) UNOCT, UNODC, ICAO, CTED, INTERPOL melalui *Counter Terrorist Travel Program* yang memfasilitasi akses terhadap pengetahuan teknis dan gambaran komprehensif tentang sistem pengelolaan API/PNR, serta membentuk jejaring profesional yang tergabung dalam Pokja Internasional/*International Working Group (IWG)* di Asia Tenggara.

2) Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Organisasi Multilateral lainnya.

Kesepakatan dilaksanakan melalui kerja sama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:

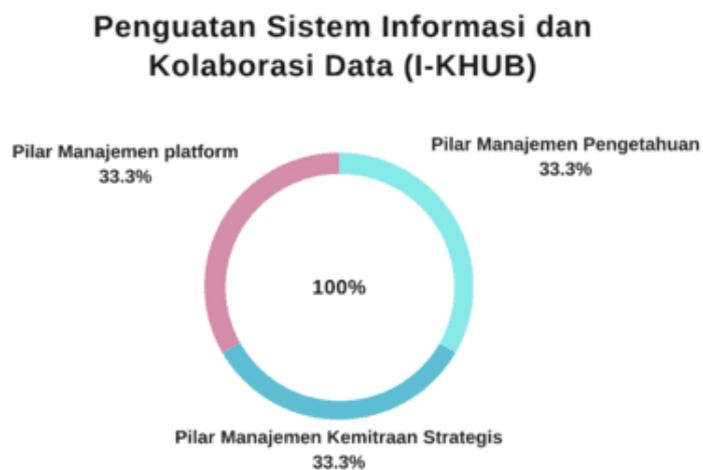
- a) Kerja sama Indonesia-Australia melalui *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* difokuskan pada pembangunan dan pengembangan I-KHub BNPT dan dukungan implementasi RAN PE. Antara lain meliputi dukungan SDM untuk pengelolaan I-KHub BNPT, dukungan pengembangan platform, pengembangan fitur laporan RAN PE pada platform I-KHub dan perawatan berkala (*maintenance platform*). Adapun dukungan implementasi RAN PE disampaikan melalui kerja kolaboratif bersama masyarakat sipil, serta dukungan penguatan implementasi RAN PE di daerah dengan berfokus pada penguatan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penyusunan dan implementasi Kebijakan.
- b) USAID melalui "*HARMONI Project*" di bawah payung kerjasama *Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF)* telah mendukung implementasi dan Keberlanjutan RAN PE yang bernuansa tematik, antara lain penyelenggaraan RAN PE Awards Tahun 2024; melalui Setara Institute telah memfasilitasi *Focus Group Discussion 7* Tematik Perpres RAN PE

Tahun 2025-2029; dan melalui Kreasi Prasasti Perdamaian telah melakukan Penyusunan RoadMap Komunikasi Strategis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

- c) Kerja sama dengan *The Habibie Center (THC)* dalam program ToT "Membangun Kapasitas Individu untuk Reintegrasi Sosial melalui Pendekatan Psikososial" melibatkan K/L terkait yang bertujuan untuk mengarusutamakan pendekatan dan intervensi psikososial terhadap mantan narapidana dalam mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat, merujuk pada keberhasilan program ProPosoku yang sebelumnya telah berhasil dikembangkan oleh THC di Poso. BNPT juga mendukung *Habibie Democracy Forum 2024* yang memperingati 25 tahun THC, bertujuan memperkuat kohesi sosial dan kolaborasi dalam penanggulangan ekstremisme.
- d) BNPT bekerja sama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) dan AIPJ2 untuk menyusun Rancangan Pedoman Teknis Penanganan WNI di Luar Negeri yang terasosiasi dengan FTF. Langkah ini merespons seruan Sekjen PBB terkait pemulangan WNI dari kamp-kamp di Timur Laut Suriah. Pemerintah Indonesia melalui Satgas Penanganan WNI, yang dipimpin BNPT, berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani WNI terasosiasi FTF, termasuk proses rehabilitasi dan reintegrasi.
- e) Kerja sama teknis dengan *Hedayah Center* dilakukan melalui program "*Preventing Extremism and Violent Extremism Online in Southeast Asia*," yang bertujuan mencegah penyebaran ekstremisme dan kekerasan berbasis online di kawasan Asia Tenggara. Program ini fokus pada pengembangan strategi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi untuk memitigasi ancaman radikalisme melalui dunia maya.
- f) Kerja sama dengan Uni Eropa dilakukan melalui program *EU P/CVE Activity Plan* yang bertujuan mendukung pencegahan dan penanggulangan

ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dan Asia Tenggara. Fokusnya meliputi penguatan kapasitas, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan pendekatan holistik untuk menangani faktor pemicu radikalisasi dan ekstremisme.

3) Penguatan Sistem Informasi dan Kolaborasi Data Strategis Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (3 kesepakatan).



I-KHub *on Countering Terrorism and Violent Extremism* BNPT dibentuk sebagai mekanisme antar Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) dengan memanfaatkan platform teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pelaporan secara akuntabel, transparan dan partisipatif.

Adapun peta jalan I-KHub dimulai pada tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, fase fondasi I-KHub BNPT berlangsung, fokus pada penguatan kelembagaan dan aktivasi jejaring dengan Pemerintahan, OMS, dan mitra pembangunan. Tahun 2022 adalah fase repository I-KHub BNPT, yang berfokus pada pengumpulan konten, penguatan pengguna platform, serta persiapan pengembangan produk pengetahuan. Tahun 2023 memasuki fase integrasi I-KHub BNPT, yaitu pertukaran data lintas platform dengan K-Hub PVE Community dan Database Geospasial Terorisme secara interaktif dan

komprehensif. Pada tahun 2024, fase utilisasi I-KHub BNPT dimulai dengan memanfaatkan data, informasi, serta produk pengetahuan untuk intervensi program dan kebijakan PVE di Indonesia. Terdapat tiga kesepakatan yang telah dilaksanakan dalam sejumlah program kegiatan pada tiga pilar I-KHub BNPT, yaitu Pilar Manajemen Produk Pengetahuan, Pilar Manajemen Kemitraan Strategis, dan Pilar Manajemen Platform. Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a) Pilar Manajemen Pengetahuan I-KHub BNPT yang berfokus pada pemetaan program dan produk pengetahuan. Fase utilisasi pada tahun 2024 ini, manajemen pengetahuan berfokus pada upaya advokasi produk pengetahuan pada kebijakan-kebijakan dan pemangku kepentingan strategis dalam upaya mewujudkan *evidence-based policy making process*. Pada tahun 2024, Pilar Manajemen Pengetahuan berhasil meluncurkan dokumen *I-KHub BNPT CT/VE Outlook 2024* yang berfokus pada analisis penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tanggal 3 Desember 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam menyusun dokumen *I-KHub BNPT CT/VE Outlook 2024*, telah dilaksanakan FGD Kolaborasi I-KHub BNPT dengan K-Hub PeaceGen dalam penyusunan Penyusunan Outlook 2024, FGD Pengumpulan Data Wawancara Lapangan di Jawa Tengah, FGD Permohonan Data kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk *CT/VE Outlook 2024*, dan FGD Penyampaian Masukan Final pada dokumen *CT/VE Outlook 2024*. Selain itu, Pilar Manajemen Pengetahuan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 telah mempublikasikan 28 Produk Pengetahuan, yaitu: 4 (empat) *Policy Analysis*, 5 (lima) *Commentaries*, 5 (lima) *Advanced Analysis*, 14 (empat belas) infografis, dan 2 *I-KHub BNPT CT/VE Outlook*.
- b) Pilar Manajemen Kemitraan Strategis I-KHub BNPT yang berfokus pada pemetaan dan pengenalan platform I-KHub BNPT sebagai sistem manajemen data digital terpadu yang mengintegrasikan data dan informasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta fasilitator kerjasama

dan kolaborasi program pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pada tahun 2024 ini, Pilar Manajemen Kemitraan Strategis I-KHub BNPT berupaya mengembangkan keterlibatan 48 Kementerian/Lembaga, 10 Kesbangpol & FKPT provinsi, 23 organisasi masyarakat sipil dan 6 mitra pembangunan. Pilar Manajemen Kemitraan Strategis berhasil melaksanakan Penguatan Inisiatif Lokal di 5 provinsi penggunaan Platform I-KHub. Adapun 5 Provinsi sasaran pada 2024 adalah Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Lampung. Penguatan Inisiatif Lokal di 5 provinsi, melalui I-KHub on CT/VE, mencapai hasil positif diantaranya:

- 1) Adanya bentuk kolaborasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dalam dengan aktor-aktor lain dalam isu P/CVE melalui platform I-KHub BNPT.
- 2) Adanya pengembangan kapasitas teknis (praktis) dan non-teknis (substansif) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam praktik kolaborasi implementasi aksi P/CVE melalui platform I-KHub BNPT.
- 3) Bertambahnya 5 provinsi yang terlibat aktif di platform I-KHub BNPT.
- 4) Terbentuknya focal point I-KHub BNPT di 5 (lima) provinsi.

Selain melaksanakan Penguatan Inisiatif Lokal di 5 provinsi pada tahun 2024 diatas, Pilar Manajemen Kemitraan juga telah melaksanakan pertemuan *Donor Coordination Meeting* (DCM) pada 3 Juni 2024 di Jakarta yang merupakan sebuah mekanisme untuk mengkonsolidasikan sumber daya dari para mitra, baik dari dalam negeri maupun internasional, guna mendukung upaya Pencegahan/Penangulangan Ekstremisme Kekerasan (P/CVE) yang dilakukan Indonesia. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk melakukan evaluasi atas program-program atau proyek-proyek bersama P/CVE yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia bersama para mitra tersebut.

- c) Pilar Manajemen *platform* I-KHub BNPT telah memasuki fase utilisasi pada tahun 2024. Pada fase ini, Pilar Manajemen Platform I-KHub BNPT dimanfaatkan secara intensif oleh mitra sebagai sarana informasi dan

kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

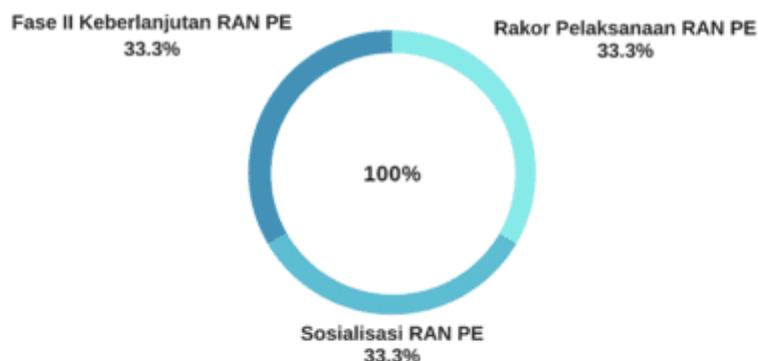
Secara statistik, Pilar Manajemen Platform I-KHub BNPT berhasil mengelola 704 konten (terdiri dari 539 produk pengetahuan, 139 artikel, dan 26 acara) yang telah diakses oleh 64.598 pengunjung sepanjang tahun 2024. Beberapa produk unggulan I-KHub yang dapat diakses langsung di platform I-KHub antara lain: 2 dokumen CT/VE Outlook tahun 2023 dan 2024, 4 Analisis Kebijakan, 5 Komentar, 5 Analisis Lanjutan, dan 14 Infografis. Selain itu, 48 Kementerian/Lembaga, 10 Pemerintah Daerah, dan 130 Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif sebagai anggota di platform I-KHub BNPT.

Sebanyak 733 Data Putusan Tindak Pidana Terorisme telah terintegrasi di platform I-KHub BNPT. Pengelolaan data ini merupakan hasil integrasi antara I-KHub BNPT dan Database Terorisme CDS. Data tersebut mencakup koleksi putusan dari tahun 2002 hingga 2023. Pada versi selanjutnya, I-KHub BNPT sedang mempersiapkan versi bilingual untuk memfasilitasi kebutuhan mitra kerja luar negeri dalam platform serta akan melakukan proses migrasi server ke fasilitas VPS yang disediakan oleh Subbag TI di Sentul.

5099.AEA.003.051. Pada output “Operasionalisasi Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan” telah mencapai target kinerja hingga 100% (3 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut:

5099.AEA.003.051.

Operasionalisasi Sekretariat Bersama RAN PE



Sekretariat RAN-PE

RAN PE menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk merespon dinamika perkembangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan aksi-aksi nyata yang terpadu dan sinergis antar-pemangku kepentingan, baik antar-kelembagaan pemerintah tingkat pusat, maupun antar pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat. Sejak diluncurkan pada Juni 2021 hingga Tahun 2024 ini, implementasi RAN PE di tingkat pusat dan daerah telah menghasilkan berbagai capaian keberhasilan melalui kerja kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai perwujudan "*Whole of Government and Whole of Society Approach*" yang merupakan pendekatan utama pelaksanaan RAN PE ini.

Saat ini, RAN PE telah melewati 4 (empat) tahun periode pelaksanaan dan akan berakhir pada tahun 2024 ini. Secara umum, perkembangan capaian Aksi RAN PE menunjukkan kemajuan. Capaian kuantitatif pelaksanaan RAN PE tahun 2024, menunjukkan hampir sebagian besar aksi telah terlaksana, yaitu sebanyak 132 dari 135 aksi (97,8%). Implementasi RAN PE Tahun 2024 merupakan kontribusi dari 48 K/L.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator independen RAN PE juga telah mencatat sejumlah capaian kualitatif RAN PE di antaranya, yaitu:

- 1) Secara nyata, RAN PE telah berhasil membentuk Struktur Tata Kelola pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Melalui keberadaan RAN PE, pendekatan lunak (soft approach) menjadi fokus dalam upaya mengeliminasi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.
- 2) Dalam aspek kebijakan, dampak keberadaan RAN PE adalah semakin memperkuat kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat nasional sekaligus mendorong implementasi RAN PE di tingkat daerah. Capaian tersebut antara lain: Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme oleh Kemen PPPA yang bekerjasama dengan *UNODC Strive Juvenile*; Standar dan Modul Perlakuan terhadap Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme oleh Kemenkumham yang bekerjasama dengan YPP; Hasil Pemetaan Perempuan Terdampak Terorisme oleh Komnas Perempuan; Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di satuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan berbagai kebijakan lainnya.
- 3) Selain memperkuat capaian di tingkat nasional, Pelokalan RAN PE menjadi RAD PE cukup dibutuhkan oleh daerah. Hingga saat ini, terdapat di 8 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten yang telah memiliki RAD PE. Dari sisi, tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 12 Kab./Kota yang telah memiliki RAD PE yaitu Kab. Lampung Tengah, Kota Surakarta, Kota Bandung, Kab. Garut, Kab. Bandung, Kab. Purwakarta, dan Kab. Bogor, Kab. Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Pematang Siantar, Kota Sukabumi, dan Kota Singkawang.

- 4) Keberadaan RAN PE juga turut memperkuat aspek kerjasama dan kemitraan. Sebagai contoh Kepemimpinan Indonesia di tingkat Internasional melalui inisiatif pengajuan Resolusi ECOSOC E/RES/2024/12 terkait “*Treatment of Children Associated with Terrorist Groups, including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups*” yang diadopsi secara *consensus pada the 33rd Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) ke-33* di Wina, Austria, 17 Mei 2024. Capaian ini juga menjadi titik awal yang mendorong penyusunan prinsip dan pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme di tingkat global.

- 5) Prinsip *whole of government dan whole of society* telah menjadi norma baru dalam implementasi RAN PE, yang dioperasionalkan melalui mekanisme kerja Pokja Tematis dan Forum Kemitraan. Hingga saat ini, Program Pokja Tematis telah tersebar di 17 Provinsi di seluruh Indonesia, yang mencakup wilayah-wilayah strategis seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Pada periode 2024, kelompok kerja ini telah menunjukkan efektivitas dengan adalah publikasi buku, outlook, SOP/pedoman, riset/kebijakan, modul, database, podcast, konten digital, tulisan, e-learning. Adapun Penerima manfaat mencakup Pemerintah Pusat, OPD Pemerintah Daerah, Korban, dan Penyintas Terorisme, OMS, Kelompok Perempuan dan Pemuda, Pelajar/mahasiswa, Tokoh agama perempuan.

- 6) Sepanjang tahun 2024, Sekber RAN PE telah merespons berbagai kebutuhan, pertanyaan, keluhan, dan temuan lapangan, yang semata-mata ditujukan untuk penguatan RAN PE agar berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE selama tahun 2024 di antaranya, yaitu:
 - a) Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 1, 2, 3, dan Tematis yang dihadiri oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE,

Kementerian/Lembaga pelaksana RAN PE, dan anggota Pokja Tematis. Pada tahun 2024, Sekber RAN PE telah melaksanakan rakor pertama pada tanggal 19 s.d. 22 Maret 2024 serta rakor kedua pada tanggal 29 s.d. 30 Oktober, 1 November, dan 5 November 2024. Rakor pertama bertujuan membahas langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE dan rencana kerja sama dengan Pokja Tematis di Tahun 2024. Sebagai langkah tindak lanjut dari rakor ini, K/L pelaksana berkomitmen untuk melakukan pengisian laporan rencana dan komitmen pelaksanaan RAN PE tahun 2024 melalui *platform* I-Khub. Sedangkan rakor kedua bertujuan membahas *progress* pelaksanaan dan mengidentifikasi realisasi pelaksanaan RAN PE di tahun 2024. Langkah tindak lanjut dari rakor kedua ialah K/L sepakat untuk mengumpulkan laporan komitmen dan pelaksanaan RAN PE tahun 2024 melalui *platform* I-Khub sebagai bahan dalam menyusun Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada Presiden RI.

- b) Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Nasional RAN PE yang diadakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Jakarta. Rakor FKN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran, fungsi, dan jejaring FKN RAN PE melalui koordinasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan di masyarakat dan terselenggara atas kerjasama Kesekretariatan Sekber RAN PE dan Wahid Foundation sebagai *co-chair* FKN dari unsur pemangku kepentingan masyarakat. Selain perwakilan pemerintah, Rakor FKN juga dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan di masyarakat lainnya (OMS, sektor swasta, lembaga filantropi, perguruan tinggi, dan media). Rakor FKN RAN PE yang diselenggarakan telah memberikan inspirasi dan praktik-praktik kemitraan yang efektif guna memperkuat upaya kolektif dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, khususnya dalam pelaksanaan RAN PE Fase II (2025-2029). Sebagai langkah tindak lanjut, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat khususnya sektor swasta, filantropi, media dan perguruan tinggi, Ketua Forum Kemitraan Pemerintah dan Ketua

Pemangku Kepentingan Masyarakat perlu menentukan prioritas isu yang akan diangkat dalam kemitraan RAN PE di setiap tahunnya.

c) Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE Tahun 2024 yang dihadiri oleh K/L anggota Sekber RAN PE dan dipimpin oleh Kepala BNPT pada 21 November 2024. Melalui rakor tersebut, disepakati beberapa poin penting sebagai berikut:

- BNPT c.q. Ketua Pokja Pilar 2 RAN PE perlu melakukan kajian lebih lanjut kepada K/L penanggung jawab terhadap aksi yang belum dapat terlaksana pada Fase 1 RAN PE, khususnya pada Pilar 2 Fokus 4 dan 5 untuk kemungkinan dilanjutkan dalam pelaksanaan RAN PE Fase 2 (2025-2029).
- Dalam rangka menjaga kontinuitas upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah, Rakor Sekber RAN PE mendorong Kementerian Hukum untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Progsun yang mencakup Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun 2025-2029.
- Batang tubuh Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 memasukkan klausul tentang kewajiban daerah dalam mengimplementasikan RAN PE dalam bentuk RAD PE.
- BNPT segera mengoordinasikan penyiapan muatan substansi RAN PE Tahun 2025-2029 dengan melibatkan K/L terkait dan mendorong partisipasi aktif Organisasi Masyarakat Sipil, Sektor Swasta, Lembaga Filantropi, Media dan Perguruan Tinggi dalam proses penyusunan Aksi RAN PE.
- Mencermati meningkatnya tren potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia 5 tahun ke depan, Rakor Sekber RAN PE menyepakati untuk mendorong penguatan dan elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam Rancangan RPJMN 2025-2029. Terkait hal ini, Rakor Sekber RAN PE merekomendasikan BNPT, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga

terkait lainnya secara bersama mendiskusikan penguatan dan elaborasi isu PE dalam dokumen Rancangan RPJMN 2025-2029.

- Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE, BNPT selaku leading sector kebijakan RAN PE dan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pelaksanaan RAN PE di daerah segera berkoordinasi untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BNPT dan Mendagri tentang Kajian Akademik RAN PE Tahun 2025-2029 kepada K/L terkait dan seluruh Pemerintah Daerah. SE tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi K/L di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan Aksi RAN PE hingga terbitnya Perpres RAN PE Tahun 2025-2029.
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah yang memiliki RAD PE. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan sebanyak dua kali, secara luring ke Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung, serta secara daring dengan melibatkan 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PE di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 4 Mei 2024 di Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE, Ditjen Polpum Kemendagri, Bakesbangpol Provinsi Lampung, dan Bakesbangpol Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat beberapa masukan dari penyelenggaraan monev ini, di antaranya penyempurnaan regulasi Perpres RAN PE agar memudahkan pelaksanaan dan sistem koordinasi dan pelaporan RAD PE, penyempurnaan SIPKS sebagai *platform* pelaporan pelaksanaan RAD PE, dan permohonan dukungan Pemerintah Pusat dalam mendorong pelaksanaan RAN PE sebagai agenda prioritas di daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

- 2) Monev pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE secara daring melalui Zoom Meeting pada 22 November 2024 terhadap 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota yang telah memiliki RAD PE. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE, Subdit Forkopimda Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Singkawang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bogor.
 - 3) Adapun hasil dari kegiatan monev ini yaitu: (a) seluruh perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir sangat antusias dalam melaporkan implementasi RAD PE di daerahnya masing-masing; (b) dengan adanya pelaporan implementasi RAD PE dapat memberikan informasi utuh kepada Kesekretariatan Sekber RAN PE dan Kemendagri mengenai pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 di daerah; (c) hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan RAD PE menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah; dan (d) adapun daerah yang memiliki kendala terbatasnya akses ke *platform* SIPKS disarankan untuk ber kirim secara manual via *WhatsApp* (WA) kepada Direktorat Wawasan Nasional (Wasnas) Ditjen Polpum Kemendagri untuk diproses ke dalam *platform* SIPKS.
- e) RAN PE Awards Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 di Jakarta yang berkolaborasi dengan Harmoni-USAID. Kegiatan bertujuan untuk mengapresiasi kerja keras dan kontribusi seluruh pihak yang telah aktif berperan dalam pelaksanaan RAN PE di sepanjang tahun 2024, sekaligus menjaga semangat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan ancaman terorisme. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat negara terkait, yaitu Wakil Presiden RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, Kepala BNPT, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Agama RI, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Anggota I BPK RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perwakilan dari kementerian/lembaga, Kelompok Ahli BNPT, perwakilan dari Kedutaan Besar negara-negara sahabat, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, Mitra Pembangunan, dan para pejabat internal BNPT. Dalam kegiatan ini Wakil Presiden sebagai *Keynote Speaker* menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya: (a) menekankan pentingnya melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mendukung perumusan RAN PE Fase II Tahun 2025-2029 yang memberikan dampak signifikan; (b) pentingnya mempererat kolaborasi multipihak guna penguatan pelaksanaan RAN PE Fase II Tahun 2025-2029; (c) meminta untuk menghapus sekat-sekat birokrasi yang kaku dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan nasional dan kesatuan bangsa; (d) mendorong peningkatan peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dan terorisme; (e) dukungan terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAN PE; dan (f) RAN PE fase berikutnya (2025-2029) dapat terus membantu untuk meningkatkan kondisi aman tanpa ancaman bagi bangsa Indonesia.

- f) Diseminasi dan Sosialisasi RAN PE di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Semarang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta. Selama tahun 2024, serangkaian kegiatan ini dilaksanakan oleh OMS dan mitra pembangunan bekerjasama dengan Kesekretariatan Sekber RAN PE, BNPT, Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah.
- g) Kunjungan Kepala BNPT terkait Kolaborasi RAN PE di Jawa Tengah untuk Sekolah Damai di Semarang dan Desa Siap Siaga di Kendal pada 12 s.d. 13 Desember 2024. kegiatan ini bertujuan (a) mengumpulkan

masukan, cerita sukses, dan dampak dari pelaksanaan program Sekolah Damai dan Desa Siap Siaga; (b) mendapatkan informasi dan pembelajaran dari masyarakat langsung untuk memperkaya strategi pengembangan program Sekolah Damai dan Desa Siap Siaga di masa depan; (c) menguatkan komitmen kerjasama BNPT dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Wahid Foundation, pihak sekolah, dan penggerak desa dalam memperluas jangkauan dan efektivitas program; dan (d) menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

7) Dalam rangka mendorong keberlanjutan RAN PE Fase II periode 2025-2029, sejumlah langkah yang dilakukan saat ini antara lain sebagai berikut:

- a) Pengajuan Perpres RAN PE Periode 2025-2029: Sekretariat Bersama RAN PE telah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden untuk RAN PE Periode 2025-2029 melalui mekanisme Progsun kepada Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- b) Evaluasi RAN PE Periode 2020-2024: RAN PE periode 2020-2024 telah dievaluasi oleh evaluator independen untuk mengkaji efektivitas dan capaian program selama periode pelaksanaan RAN PE.
- c) Koordinasi dengan Bappenas: Rakor Sekber RAN PE Tahun 2024 telah menyepakati untuk mendorong penguatan dan elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam Rancangan RPJMN 2025-2029.
- d) Pelaksanaan FGD Tematik: Untuk periode RAN PE 2025-2029, Sekber RAN PE telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Tematik sepanjang Mei-Agustus 2024 sebagai bagian dari proses penajaman aksi-aksi dalam RAN PE fase kedua. FGD bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam dan spesifik setiap tema dari 9 tematik

sebagaimana draf Perpres RAN PE Tahun 2025-2029; dan menerima masukan, saran, dan tindak lanjut untuk memperkaya dan mempertajam setiap tema dan draf matriks aksi PE dari 9 tema pokok dalam draf Perpres RAN PE Tahun 2025-2029.

- e) Integrasi RAN PE dalam APBD 2025: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memasukkan RAN PE ke dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025, untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat daerah.

Direktorat Perangkat Hukum Internasional

Berikut merupakan poin rincian dari pelaksanaan rangkaian program kegiatan selama tahun 2024 hingga diperoleh **11 Rekomendasi Kebijakan**, antara lain:

- a. Pada output “Partisipasi Aktif dalam Konvensi dan Resolusi Penanggulangan Terorisme Internasional” telah **mencapai target kinerja hingga 100% (empat rekomendasi kebijakan)** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penguatan peran dan posisi Indonesia dalam implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi perangkat serta standar hukum internasional seperti konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme.

- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam Financial Action Task Force (FATF) Plenary di Paris – Prancis, beserta dengan rangkaian kegiatannya untuk memenuhi kepatuhan dan efektivitas Indonesia setelah menjadi anggota penuh FATF. Utamanya, BNPT sebagai Juru Bicara Indonesia pada RTMG (Risk, Trends, and Method Group) FATF, dan Lead Reviewer ICRG (International Cooperation Review Group) FATF.
- Pasca Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia

- FATF yang terdiri dari 23 unsur K/L. BNPT berpartisipasi aktif melalui peran Deputy Bidang Kerjasama Internasional sebagai Wakil Ketua 1 Tim Bersama (PPATK selaku Ketua, dan BI selaku Wakil Ketua 2). Tim Bersama bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota tetap FATF, serta meningkatkan tata kelola efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPSPM) di Indonesia.
- Lebih lanjut pada tahun 2024, BNPT melalui Direktorat Perangkat Hukum Internasional sebagai salah satu K/L yang berperan atas diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF, telah berkontribusi positif pada keanggotaan penuh Indonesia di FATF pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) perwakilan Direktorat Perangkat Hukum Internasional BNPT turut berpartisipasi aktif sebagai Lead Reviewer International Cooperation Review Group (ICRG) FATF;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan BNPT berpartisipasi aktif sebagai anggota project team “*comprehensive updates on terrorist financing*” Risk Trends and Methods Group (RTMG) FATF, dan anggota project team Evaluation and Compliance group (ECG) FATF; dan
 - 3) Direktorat PHI BNPT turut berpartisipasi aktif pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan pada bulan Februari, Juni, dan Oktober Tahun 2024.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah dihasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan peran dan posisi Indonesia dalam implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme.**

- 2) Penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menguatkan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi

pelaksanaan tindak lanjut terkait resolusi internasional baik di bidang penanggulangan terorisme maupun bidang penanggulangan pendanaan terorisme. Selain itu, BNPT turut terlibat dalam peran Indonesia di forum internasional, khususnya terkait posisi Indonesia dalam melaksanakan upaya penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme dalam kerangka Resolusi DK PBB.

- Pelaksanaan partisipasi aktif dalam Sesi Tahunan ke-62 *Asian-African Legal Consultative Organization* (AALCO) yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 September 2024 di Bangkok, Thailand. Pertemuan AALCO merupakan forum untuk mendiskusikan serta menyatukan dan memperjuangkan kepentingan negara-negara di kawasan Asia-Afrika, khususnya di bidang hukum internasional. Sesi Tahunan ke-62 AALCO dihadiri oleh Delegasi dari 39 negara anggota, 3 negara *observer*, dan 6 organisasi internasional. BNPT sebagai salah satu Delegasi RI yang hadir menyampaikan intervensi pada sesi pembahasan khusus terkait “*international terrorism*”.
- Direktorat Perangkat Hukum Internasional juga terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan *Plan of Action 2024 - 2026 The International Institute For Justice And The Rule Of Law (IIJ) Regional Project on Building Capacity and Improving Cooperation Mechanisms on Countering the Financing of Terrorism in Southeast Asia*. Pelaksanaan kegiatan membahas perkembangan isu Penanggulangan Pendanaan Terorisme termasuk tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh negara-negara terhadap isu TPPT, seperti aspek-aspek terkait penyalahgunaan NPO, dan aset virtual. Rangkaian kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2024 yaitu “*Official Launch of the Regional Project on Building Capacity and Improving Cooperation Mechanisms on Countering the Financing of Terrorism*” pada tanggal 3 - 4 Juni 2024 di Malta dan *CFT Regional Workshop: “Human Rights-Compliant Approaches to Countering the Financing of Terrorism and Risk-Based Implementation of FATF Recommendation 8”*, pada tanggal 19 - 21 November 2024 di Cebu City, Filipina.

- Dalam menjalankan mandat-mandat Resolusi DK PBB serta standar kepatuhan internasional FATF yang juga dituangkan melalui kebijakan-kebijakan nasional salah satunya upaya nasional rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPSPM), BNPT selaku anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Lebih lanjut pada tahun 2024, BNPT melalui Direktorat Perangkat Hukum Internasional telah melaksanakan peran sebagai Ketua Fokus III Pokja Komite TPPU.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah diperoleh **1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional.**

- 3) Penggalangan mitra kerja pada bidang konvensi dan resolusi internasional. Pada tahun 2024, penggalangan mitra dalam penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme pada bidang konvensi internasional dan resolusi internasional dilakukan dengan negara-negara mitra seperti Australia, Singapura, Malta, Filipina, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan mitra-mitra luar negeri lainnya. Pada beberapa mitra dilakukan beberapa kali pertukaran informasi. Selain itu, dilakukan pula koordinasi terkait dengan identitas-identitas individu dan/atau entitas atau organisasi teroris yang masih terkait dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut dihasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari pertukaran informasi dengan negara-negara mitra serta mitra luar negeri, dan perkembangan terkait individu dan entitas yang masih terkait dengan identitas dalam DTTOT.**

- 4) Operasionalisasi tim penanggulangan pendanaan terorisme / *Counter Terrorist Financing* (CTF).

Selama satu tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan operasional Tim CTF BNPT, yang antara lain melaksanakan pemutakhiran Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sebagai upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Tim CTF dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain berperan dalam mengoptimalkan pencegahan melalui analisis dan pemantauan berbasis risiko. Kegiatan operasional Tim CTF telah menghasilkan **1 (satu) rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari 1 rekomendasi pemutakhiran DTTOT untuk penghapusan (*delisting*), 3 rekomendasi untuk pencantuman kembali (*renewal*), 1 informasi terkait upaya penghapusan identitas dari DTTOT, dan rangkaian laporan operasional Tim CTF selama satu tahun anggaran.**

- b. Pada output “Partisipasi Aktif BNPT dalam Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme dan Partisipasi Aktif BNPT dalam melindungi kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme” telah **mencapai kinerja hingga 100% (tujuh rekomendasi kebijakan)** dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) rekomendasi kebijakan sebelum Relaksasi *Automatic Adjustment*, antara lain:
 - 1) Rekomendasi Kebijakan: Perlindungan WNI di Hong Kong dari Tindak Pidana Terorisme. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Hong Kong.
 - 2) Rekomendasi Kebijakan: Tantangan dan Strategi Perlindungan WNI Terhadap Ancaman Terorisme di Sabah, Malaysia. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Sabah, Malaysia.
 - 3) Rekomendasi Kebijakan: Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berasal dari Jawa Barat dari Tindak Pidana Terorisme.

Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya Rapat Koordinasi Pelindungan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dari Tindak Pidana Terorisme.

- 4) Rekomendasi Kebijakan: Pedoman Pencegahan Ekstremisme Kekerasan melalui Pelibatan Komunitas Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya Penyusunan Modul Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Tingkat Komunitas.
- 3 (tiga) rekomendasi kebijakan setelah Relaksasi *Automatic Adjustment*, antara lain:
 - 1) Rekomendasi Kebijakan Terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Terorisme melalui Penguatan Komunitas di Tingkat Daerah dan Calon Pekerja Migran Indonesia. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan:
 - Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (CVE) di lima kota, yaitu Banyuwangi, Jember, Lombok Tengah (NTB), Wonosobo, dan Kebumen.
 - Monitoring dan Evaluasi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) Terkait Penyampaian Materi Pencegahan Terorisme kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kerja BP2MI/BP3MI sektor G to G dan P to P di Jawa Barat (Depok, Indramayu, Subang, Bekasi), Wilayah Kerja BP3MI Jawa Tengah (Cilacap) dan Wilayah Kerja BP3MI Banten (Tangerang).
 - 2) Rekomendasi Kebijakan: Pelindungan WNI di Luar Negeri di Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dari Tindak Pidana Terorisme. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Mesir, Filipina, Thailand, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia.
 - 3) Rekomendasi Kebijakan: Pelindungan WNI di Luar Negeri di Wilayah Amerika dan Eropa. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Norwegia, Polandia, Turki, Perancis, Kanada, Austria, New York AS, Jenewa Swiss.

C. Kinerja Anggaran

Selama tahun 2024, realisasi anggaran pada Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebesar 99.96% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah mengalami *Automatic Adjustment* dan pemotongan anggaran.



Pagu anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Internasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.892.811.000- dengan realisasi penyerapan sebesar 99.96% atau sebesar Rp. 22.882.832.294,- dengan rincian per komponen seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Kinerja Anggaran Tahun 2024
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

(dalam Rp)

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi	%
1.	Kerja Sama Regional dan Multilateral dalam Penanggulangan Terorisme	8.681.688.000	8.676.504.009	99.94%
2.	Kerja Sama Bilateral dalam Penanggulangan Terorisme	5.629.262.000	5.624.505.980	99,91%
3.	Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional	8.581.861.000	8.581.822.305	100%
Total		22.892.811.000	22.882.832.294	99.96%



4

Penutup

Simpulan Umum atas capaian Deputi Bidang Kerja Sama Internasional serta Langkah yang akan dilakukan di masa depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada laporan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan:

- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan meskipun terdapat keterbatasan anggaran, yang tercermin dalam:
 - Pencapaian target kinerja 98%
 - Penyerapan anggaran 99.96%
- Kendala utama dalam pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional T.A. 2024 adalah blokir pagu anggaran/*automatic adjustment* dan pemotongan anggaran yang mengakibatkan penyesuaian anggaran dalam mengakomodir jalannya program kegiatan. Hal ini antara lain berdampak pada pergeseran prioritas kegiatan, penundaan dan pergeseran anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah ketidakstabilan politik dan keamanan global yang berdampak pada penundaan kerja sama oleh negara mitra;
- Penyesuaian anggaran menjadi salah satu pembelajaran penting

dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan;

- Sinergi dengan mitra internasional dan komunitas lokal juga memberikan dampak positif dalam keberhasilan implementasi program dan kegiatan.

B. Rekomendasi

Berikut merupakan rekomendasi yang dapat disampaikan guna kelancaran pencapaian kinerja pada tahun berikutnya:

- **Pengelolaan Anggaran yang Proaktif:**
 - Mengantisipasi kebijakan penyesuaian anggaran dengan menyusun perencanaan yang fleksibel, meningkatkan efisiensi, dan memastikan alokasi anggaran tetap optimal untuk mencapai target.
 - Memanfaatkan sumber pendanaan alternatif, seperti hibah atau dukungan mitra internasional, untuk mendukung pelaksanaan program.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Meningkatkan intensitas monitoring dan

evaluasi pada setiap tahap pelaksanaan program untuk memastikan capaian sesuai rencana dan mengidentifikasi potensi perbaikan sejak dini.

- **Optimalisasi Teknologi:** Melanjutkan pemanfaatan teknologi melalui pertemuan virtual untuk mendukung implementasi kerja sama yang tertunda akibat kendala politik dan keamanan global.
- **Peningkatan Komunikasi dengan Mitra:** Menjalinkan komunikasi yang lebih intensif dengan negara mitra, baik melalui platform virtual maupun kunjungan langsung, guna mendorong keberlanjutan kerja sama.

Target-target dalam IKU yang ditetapkan sesuai dengan Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam

Perjanjian Kinerja yakni 100%, dan proses *refinement* Perjanjian Kinerja yang dilakukan rutin setiap tahun menjadi bukti komitmen Deputi Bidang Kerja Sama Internasional yang akan terus memperbaiki diri dan tidak merasa cukup atas ketercapaian target. Adapun tahun 2024 bukanlah tahun tanpa cela - sempurna, tanpa perbaikan; proses revaluasi atas pelaksanaan kinerja – *refinement* Perjanjian Kinerja, penyusunan Perencanaan Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong proses bisnis dan layanan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program kegiatan..



Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN KEDEPUTIAN BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL



Diseminasi dan Koordinasi Pelindungan Warga Negara Indonesia di Kota Kinabalu Sabah
(Malaysia) dari Tindak Pidana Terorisme



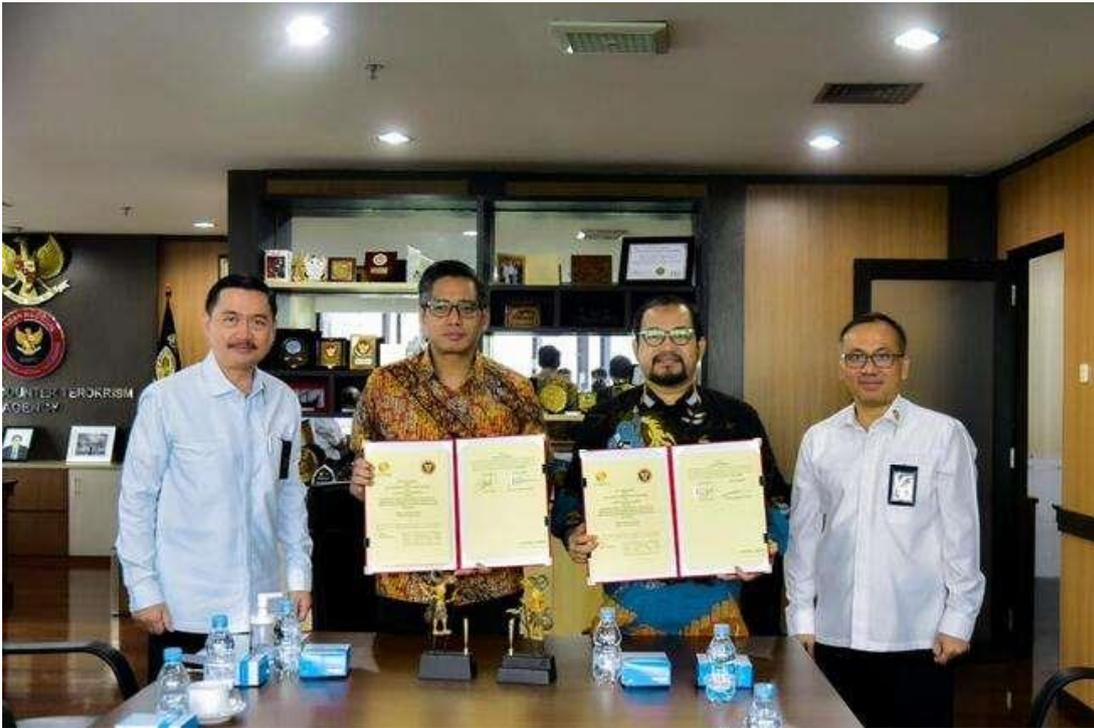
Courtesy Call dengan Deputi DG Australia Security Intelligence Organization (ASIO)



Diskusi Pembahasan Buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” dan Pemutaran Film “Road to Resilience”, 17 Juli 2024



Learning Event Harmoni-Learning and Legacy, 21-22 Agustus 2024



Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BNPT RI dengan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) tentang Implementasi RAN PE dalam Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi



Penerimaan Kunjungan Delegasi World Organization for Al Azhar Alumni Graduates



Pertemuan dengan Dewan Federasi Rusia Komite Bidang Pertahanan dan Keamanan, Rusia



Serah Terima Server I-KHub BNPT dari PeaceGeneration Indonesia kepada BNPT, Hotel Mercure Sabang, Jakarta



Pertemuan dengan Mr. Richard Feakes (Australian CT Ambassador)



Pertemuan dengan Al Azhar Observatory for Combating Extremism, Mesir



Pertemuan Review Kurikulum Pelatihan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Kimia



Rapat Koordinasi Kedua Pokja Pilar 3 RAN PE